

## PENERAPAN PSAK 65 DALAM HUBUNGAN PUSAT DAN CABANG TOKO BANGUNAN USAHA BARU

Ilas Ramadhani<sup>1</sup>, Naimatul Huda<sup>2</sup>, Putri Amanda<sup>3</sup>, Yosep Eka Putra<sup>4</sup>, Megarahmi<sup>5</sup>

Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini didorong oleh implementasi akuntansi yang lemah pada UMKM yang telah berkembang menjadi lebih dari satu unit bisnis, seperti Toko Bangunan Usaha Baru, yang meskipun memiliki kantor pusat dan cabang, tidak menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kondisi pencatatan keuangan saat ini, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakcukupan sistem akuntansi, dan memberikan rekomendasi untuk menerapkan sistem akuntansi terstandar di kantor pusat dan cabang guna menghasilkan informasi keuangan yang dapat diandalkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan pengamatan langsung, dengan pemilik usaha sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha tersebut tidak memiliki catatan keuangan, tidak menentukan depresiasi aset, tidak memisahkan transaksi pribadi, tidak mencatat pergerakan persediaan antara kantor pusat dan cabang, serta tidak memiliki laporan keuangan. Rekomendasi yang diberikan meliputi implementasi buku kas harian, kartu persediaan, pencatatan pergerakan aset pusat-cabang, penentuan gaji pemilik, perhitungan depresiasi aset tetap, dan penyusunan laporan keuangan dasar sesuai dengan PSAK EMKM. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi sistem akuntansi yang tepat dapat meningkatkan akurasi informasi keuangan dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif.

**Kata kunci:** Akuntansi UMKM, kantor pusat dan cabang, laporan keuangan.

### Abstract

*This research is motivated by the weak implementation of accounting in MSMEs that have developed into more than one business unit, such as Toko Bangunan Usaha Baru, which, despite having a head office and branches, does not implement a structured financial recording and reporting system. This study aims to determine the current state of financial recording, identify the factors causing the lack of an adequate accounting system, and provide recommendations for implementing standardized head office and branch accounting to produce reliable financial information. The study used a qualitative approach with interviews and direct observation methods with the business owner as the primary data source. The results showed that the business does not have financial records, does not determine asset depreciation, does not separate private transactions, does not record central-branch inventory movements, and does not have financial reports. Recommendations provided include the implementation of daily cash books, stock cards, recording central-branch asset movements, determining owner salaries, calculating fixed asset depreciation, and preparing basic financial reports in accordance with PSAK EMKM. These findings confirm that the implementation of an appropriate accounting system can improve the accuracy of financial information and become the basis for more effective business decision-making.*

**Keywords:** MSME accounting, head office and branches, financial reports.

## PENDAHULUAN

UMKM merupakan sektor ekonomi yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan berkembangnya skala usaha, banyak UMKM yang tidak lagi beroperasi pada satu lokasi saja, melainkan telah memiliki lebih dari satu unit usaha, seperti kantor pusat dan cabang. Pada kondisi tersebut, kebutuhan terhadap sistem akuntansi yang terstruktur menjadi semakin mendesak karena aktivitas keuangan tidak lagi bersifat sederhana.

Akuntansi, sebagaimana dijelaskan oleh Kurniawan et al. (2024), merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi agar dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan. Definisi ini sejalan dengan pandangan American Accounting Association yang menyatakan bahwa akuntansi berfungsi untuk menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi para pengguna.

Namun, dalam praktik nyata, masih banyak UMKM yang belum menerapkan sistem pencatatan keuangan yang memadai, terutama UMKM yang telah memiliki cabang. Salah satu contoh kasus terdapat pada Toko Bangunan Usaha Baru, sebuah usaha yang telah memiliki kantor pusat dan cabang, tetapi tidak menerapkan pencatatan keuangan secara sistematis. Seluruh transaksi pembelian, penjualan, kas masuk, dan kas keluar hanya bergantung pada ingatan pemilik tanpa adanya dokumentasi tertulis. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar akuntansi berbasis akrual dan tidak memenuhi ketentuan PSAK EMKM yang mewajibkan entitas untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat diverifikasi.

Padahal, menurut Mulyadi (2008), sistem akuntansi berfungsi sebagai rangkaian formulir, catatan, dan prosedur yang dirancang untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan efektivitas operasional. Baridwan (2008) juga menegaskan bahwa sistem akuntansi merupakan jaringan pencatatan yang bertujuan menghasilkan laporan keuangan sebagai dasar evaluasi usaha. Dengan demikian, sistem akuntansi yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan efisiensi perusahaan, terlebih pada struktur usaha multi-unit seperti kantor pusat dan cabang.

PSAK 65 memberikan pedoman mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika suatu entitas memiliki pengendalian atas satu atau lebih entitas lain. Prinsip yang digunakan dalam standar ini berlandaskan pada konsep pengendalian, yaitu kemampuan untuk mengatur kebijakan operasional dan keuangan suatu perusahaan sehingga entitas pengendali dapat memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas entitas yang dikendalikan. Suatu entitas dinilai memiliki pengendalian apabila secara langsung ataupun melalui pihak lain memiliki kepemilikan hak suara lebih dari 50%. Hak suara tersebut berkaitan dengan kewenangan dalam menentukan keputusan strategis, sedangkan hak protektif hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan pemegangnya dan tidak memberikan kekuasaan untuk mengendalikan entitas terkait (Saputri et al., 2023).

Mengacu pada ketentuan tersebut, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, seluruh informasi mengenai posisi keuangan, pendapatan, dan beban dari setiap entitas yang tergabung harus digabungkan dan disajikan sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasian merefleksikan kondisi grup usaha seolah-olah merupakan satu entitas ekonomi, meskipun masing-masing perusahaan secara hukum berdiri sebagai badan usaha yang terpisah.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa akuntansi hubungan antara kantor pusat dan cabang membutuhkan mekanisme pencatatan timbal balik agar laporan keuangan tidak mengalami distorsi. Roefinal et al. (2017) menemukan bahwa tanpa pencatatan yang tepat terhadap pengiriman barang, aliran kas, dan transaksi internal lainnya, laporan konsolidasian berpotensi mengandung duplikasi atau selisih yang tidak dapat dijelaskan. Temuan tersebut sejalan dengan Ramadhan et al. (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan operasional kantor cabang sangat dipengaruhi oleh sistem pencatatan yang terpisah, tetapi tetap terintegrasi dengan kantor pusat. Pencatatan ini mencakup transaksi persediaan, kas kecil, beban operasional, hingga penyetoran pendapatan kepada kantor pusat.

Temuan empiris tersebut juga memperkuat konsep dalam literatur bahwa entitas dengan struktur multi-unit membutuhkan sistem pengendalian internal yang lebih kuat. Rudianto (2009) menjelaskan

bahwa dana kas kecil harus dikelola menggunakan metode imprest atau fluctuation untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Simmamora (2010) menambahkan bahwa kas kecil diperlukan sebagai dana operasional bernilai kecil yang harus dicatat dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan. Di sisi lain, PSAK 14 mewajibkan pencatatan persediaan secara terperinci guna menjamin keandalan informasi mengenai stok barang, sementara PSAK 16 mewajibkan pengakuan penyusutan atas aset tetap untuk menggambarkan penurunan nilai ekonomis secara sistematis.

Kenyataannya, Toko Bangunan Usaha Baru tidak melakukan pencatatan terhadap kas kecil, persediaan, maupun penyusutan aset tetap seperti kendaraan operasional dan peralatan kerja. Tidak adanya pemisahan transaksi antarunit pusat dan cabang menunjukkan lemahnya penerapan sistem akuntansi, sehingga pemilik usaha tidak memiliki dasar informasi yang memadai untuk mengukur kinerja cabang, menentukan efisiensi biaya, atau mengontrol perpindahan barang antarunit. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan telah melanggar prinsip dasar akuntansi dan berpotensi menghambat keberlanjutan usaha.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, dapat dipahami bahwa kualitas laporan keuangan suatu UMKM sangat dipengaruhi oleh sejauh mana sistem akuntansi diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kondisi pencatatan akuntansi pada Toko Bangunan Usaha Baru, mengidentifikasi kendala yang menyebabkan belum diterapkannya sistem akuntansi, serta memberikan rekomendasi penerapan akuntansi kantor pusat dan cabang yang sesuai dengan standar dan kebutuhan UMKM modern. Dengan adanya kajian ini, diharapkan pemilik usaha dan UMKM lain yang memiliki struktur serupa dapat menyadari pentingnya pencatatan keuangan yang terstruktur sebagai dasar pengambilan keputusan yang akurat.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung. Informasi dan data utama diperoleh dari wawancara mendalam dengan pemilik usaha, yaitu Bapak M. Jamil, sebagai sumber informasi primer yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kegiatan operasional dan keuangan perusahaan. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh data yang akurat dan mendetail mengenai struktur organisasi, sistem pencatatan keuangan, aset, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan usaha.

Selain itu, wawancara dilengkapi dengan observasi lapangan secara langsung pada kantor pusat dan cabang untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi dan aktivitas usaha. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menginterpretasikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam praktik akuntansi dan manajemen yang diterapkan di perusahaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pencatatan Keuangan**

Hasil observasi menunjukkan bahwa Toko Bangunan Usaha Baru tidak menerapkan pencatatan keuangan sama sekali. Seluruh transaksi kas masuk, kas keluar, pembelian, maupun penjualan hanya bergantung pada ingatan pemilik tanpa dokumentasi yang terstruktur. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip akuntansi yang mewajibkan entitas menyajikan informasi keuangan yang relevan dan andal sebagaimana diamanatkan dalam PSAK EMKM serta PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Ketiadaan pencatatan menyebabkan laporan keuangan tidak dapat disusun, saldo kas tidak dapat ditelusuri, dan keputusan usaha tidak didukung oleh data keuangan yang dapat diverifikasi.

### **Solusi**

Agar pencatatan keuangan dapat berjalan secara berkelanjutan, usaha perlu menerapkan sistem akuntansi sederhana yang dapat dilakukan setiap hari tanpa membutuhkan kemampuan teknis yang kompleks. Pemilik dianjurkan untuk menggunakan buku kas harian, buku penjualan, buku pembelian, serta melakukan pengelompokan akun berdasarkan chart of accounts sederhana yang mudah dipahami. Selain itu, pemilik perlu menetapkan prosedur pencatatan yang konsisten, seperti pendokumentasian bukti

transaksi, pencatatan kas harian, dan penutupan buku pada akhir bulan. Dengan adanya sistem ini, usaha dapat menyajikan laporan keuangan dasar sesuai prinsip PSAK EMKM sehingga informasi keuangan dapat dinilai, diukur, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagai bentuk bantuan praktis, kami telah membantu menyusun laporan laba rugi, perubahan modal dan posisi keuangan untuk satu periode tertentu sebagai acuan awal bagi pemilik.

**Kantor Pusat**

Di bawah ini disajikan Laporan Laba Rugi yang telah kami susun berdasarkan data usaha selama satu periode, untuk memberikan gambaran ringkas mengenai pendapatan, beban, dan hasil usaha.

**Tabel 1.** Laporan Laba Rugi  
 LAPORAN LABA RUGI PER DESEMBER 2024

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Penjualan	Rp 780.000.000
HPP	-Rp 395.000.000
Laba Kotor	Rp 385.000.000
Beban:	
Beban Gaji Karyawan	Rp 26.880.000
Beban Listrik	Rp 2.400.000
Upah Muat	Rp 4.200.000
Beban BBM	Rp 4.500.000
Total beban	-Rp 37.980.000
Laba Bersih	Rp 347.020.000

Berikut disajikan Laporan Perubahan Modal yang telah kami susun guna menunjukkan perubahan modal pemilik selama satu periode, termasuk tambahan investasi serta laba bersih yang diperoleh.

**Tabel 2.** Laporan Perubahan Modal  
 LAPORAN PERUBAHAN MODAL PER DESEMBER 2024

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Modal Awal	Rp 33.000.000
Setoran Modal Selama Periode Berjalan	-
Laba Ditahan Diawal	Rp 600.000.000
Laba Tahun Berjalan	Rp 347.020.000
Prive	-Rp 224.020.000
Modal Ditahan Diakhir	Rp 723.000.000
Modal Akhir	Rp 756.000.000

Berikut disajikan Laporan Posisi Keuangan yang telah kami susun untuk menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas usaha pada akhir periode pelaporan sebagai dasar evaluasi kondisi keuangan usaha.

**Tabel 3.** Laporan Posisi Keuangan  
 LAPORAN POSISI KEUANGAN PER DESEMBER 2024

<b>Aset Lancar:</b>			<b>Liabilitas:</b>		
Cash	Rp	20.750.000	Utang ke Pemasok	Rp	12.775.000
Piutang Dagang	Rp	44.725.000			
Persediaan Barang Dagang	Rp	165.500.000	<b>Modal:</b>		
Perlengkapan	Rp	1.050.000	Modal Akhir	Rp	756.000.000
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>Rp</b>	<b>232.025.000</b>			
<b>Aset Tetap:</b>	Rp	45.000.000			
Truk Engkel					
Akumulasi Penyusutan	-Rp	7.000.000			

Bangunan	Rp	25.000.000			
Akumulasi Penyusutan	-Rp	1.250.000			
Tanah	Rp	25.000.000			
<b>Total Aset Tetap</b>	<b>Rp</b>	<b>86.750.000</b>			
<b>Investasi di Cabang</b>	<b>Rp</b>	<b>450.000.000</b>			
<b>Total Aset</b>	<b>Rp</b>	<b>768.775.000</b>	<b>Total Liabilitas+Ekuitas</b>	<b>Rp</b>	<b>768.775.000</b>

### Kantor Cabang

Di bawah ini disajikan Laporan Laba Rugi yang telah kami susun berdasarkan data usaha selama satu periode, untuk memberikan gambaran ringkas mengenai pendapatan, beban, dan hasil usaha.

**Tabel 4.** Laporan Laba Rugi

**TOKO USAHA BARU 2 – LAPORAN LABA RUGI PER DESEMBER 2024**

Penjualan		Rp	992.000.000
HPP		-Rp	420.000.000
Laba Kotor Beban:		Rp	572.000.000
Beban Gaji Karyawan	Rp	100.800.000	
Beban Listrik	Rp	3.000.000	
Upah Muat	Rp	8.500.000	
Beban BBM	Rp	10.300.000	
Beban Penyusutan	Rp	18.250.000	
Total beban		-Rp	140.850.000
<b>Laba Bersih</b>		<b>Rp</b>	<b>431.150.000</b>

Berikut disajikan Laporan Perubahan Modal yang telah kami susun guna menunjukkan perubahan modal pemilik selama satu periode, termasuk tambahan investasi serta laba bersih yang diperoleh.

**Tabel 5.** Laporan Perubahan Modal

**TOKO USAHA BARU 2 – LAPORAN PERUBAHAN MODAL PER DESEMBER 2024**

Uraian	Jumlah
Kantor Pusat	Rp 58.850.000
Setoran Modal Selama Periode Berjalan	-
Laba Ditahan Diawal	Rp 400.000.000
Laba Tahun Berjalan	Rp 431.150.000
Prive	-Rp 425.000.000
Modal Ditahan Diakhir	Rp 406.150.000
Modal Akhir	Rp 465.000.000

Berikut disajikan Laporan Posisi Keuangan yang telah kami susun untuk menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas usaha pada akhir periode pelaporan sebagai dasar evaluasi kondisi keuangan usaha.

**Tabel 6.** Laporan Posisi Keuangan

**TOKO USAHA BARU 2 – LAPORAN POSISI KEUANGAN PER DESEMBER 2024**

Aset Lancar:		Liabilitas:	
Cash	Rp 20.500.000	Utang ke Pemasok	Rp 43.135.000
Piutang Dagang	Rp 26.285.000		
Persediaan Barang Dagang	Rp 175.500.000	<b>Modal:</b>	
Perlengkapan	Rp 1.100.000	Kantor Pusat	Rp 465.000.000

<b>Total Aset Lancar</b>	<b>Rp 223.385.000</b>		
<b>Aset Tetap:</b>			
Mobil L-300	Rp 30.000.000		
Akumulasi Penyusutan Mobil Kijang Innova	-Rp 6.500.000		
Akumulasi Penyusutan Truck Fuso	Rp 45.000.000		
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-Rp 13.000.000		
Akumulasi Penyusutan Tanah	Rp 140.000.000		
Total Aset Tetap	-Rp 15.000.000		
	Rp 72.500.000		
	-Rp 3.250.000		
	Rp 35.000.000		
Total Aset Tetap	Rp 284.750.000		
<b>Total Aset</b>	<b>Rp 508.135.000</b>	<b>Total</b>	<b>Rp 508.135.000</b>
		<b>Liabilitas+Ekuitas</b>	

#### Dasar Teoretis Laporan Keuangan Konsolidasian (PSAK 65)

Menurut PSAK No. 65, laporan keuangan konsolidasian adalah laporan yang menyajikan kondisi keuangan perusahaan induk beserta seluruh entitas anaknya dalam bentuk satu kesatuan entitas tunggal. Laporan ini memuat informasi mengenai posisi keuangan serta kinerja operasional gabungan antara induk dan anak perusahaan, yang diperlakukan seolah-olah merupakan satu entitas yang sama (Khaerudin et al. 2023).

Menurut Sriyanto et al. (2023), laporan keuangan konsolidasian merupakan bentuk penyajian laporan yang menggambarkan gabungan entitas sebagai satu unit ekonomi. Laporan ini mencakup entitas induk beserta satu atau lebih perusahaan anak yang berada dalam pengendaliannya, termasuk seluruh afiliasi yang beroperasi di bawah struktur manajemen yang sama. Di dalamnya juga tercakup aktivitas divisi usaha induk dan seluruh perusahaan anak, serta porsi ekuitas pihak nonpengendali yang kepemilikannya baik secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat dikaitkan sepenuhnya kepada perusahaan induk. Penyusunan laporan konsolidasi ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait pengaruh pengendali terhadap kebijakan operasional dan finansial seluruh kelompok usaha secara keseluruhan.

Berikut disajikan Kertas Kerja Konsolidasi yang telah kami susun untuk menggabungkan akun-akun kantor pusat dan kantor cabang, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang terintegrasi dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

**Tabel 7. Kertas Kerja Konsolidasi**

POS	Kantor Pusat	Kantor Cabang	Eliminasi		Gabungan
			Debit	Kredit	
Penjualan	Rp 780.000.000	Rp 992.000.000			Rp 1.772.000.000
Laba Cabang	Rp 431.150.000	Rp -	Rp 431.150.000		Rp -
Kredit	Rp 1.211.150.000	Rp 992.000.000			Rp 1.772.000.000
HPP	Rp 395.000.000	Rp 420.000.000		Rp -	Rp 815.000.000
Penyusutan	Rp -	Rp 18.250.000			Rp 18.250.000
Beban Lainnya	Rp 37.980.000	Rp 122.600.000			Rp 160.580.000
Debit	Rp 432.980.000	Rp 560.850.000			Rp 993.830.000
Laba Neto, Carry Forward	Rp 778.170.000	Rp 431.150.000	Rp 431.150.000	Rp -	Rp 778.170.000
Saldo Laba, 1 Januari	Rp 1.000.000.000				Rp 1.000.000.000
Kantor Pusat, Saldo Penutupan		Rp 465.000.000	Rp 450.000.000		
Laba Neto, dari atas	Rp 778.170.000	Rp 431.150.000	Rp 431.150.000	Rp -	Rp 778.170.000
	Rp 1.778.170.000	Rp 896.150.000			Rp 1.778.170.000
Dividen diumumkan (Prive)	Rp 224.020.000	Rp 425.000.000			Rp 649.020.000
Saldo Laba, 31 Desember, Carry Forward	Rp 1.554.150.000	Rp 471.150.000	Rp 450.000.000	Rp -	Rp 1.129.150.000
Kas	Rp 20.750.000	Rp 20.500.000			Rp 41.250.000
Piutang Dagang	Rp 44.725.000	Rp 26.285.000			Rp 71.010.000
Perediaan Barang Dagang	Rp 165.500.000	Rp 175.500.000			Rp 341.000.000
Perlengkapan	Rp 1.050.000	Rp 1.100.000			Rp 2.150.000
Truk Engkel	Rp 45.000.000	Rp -			Rp 45.000.000
Mobil L300	Rp -	Rp 30.000.000			Rp 30.000.000
Mobil Kijang Inova	Rp -	Rp 45.000.000			Rp 45.000.000
Truk Fuso	Rp -	Rp 140.000.000			Rp 140.000.000
Bangunan	Rp 25.000.000	Rp 72.500.000			Rp 97.500.000
Tanah	Rp 25.000.000	Rp 35.000.000			Rp 60.000.000
Investasi di cabang	Rp 450.000.000			Rp 450.000.000	Rp -
Debit	Rp 777.025.000	Rp 545.885.000			Rp 872.910.000
Akumulasi Penyusutan	Rp -	Rp 18.250.000			Rp 18.250.000
Utang Dagang	Rp 12.775.000	Rp 43.155.000			Rp 55.930.000
Saldo Laba (dan Kantor Pusat), dari atas	Rp 764.250.000	Rp 484.500.000			Rp 798.750.000
Kredit	Rp 777.025.000	Rp 545.885.000	Rp 450.000.000	Rp 450.000.000	Rp 872.910.000

**Penyusutan Aset Tetap**

Pemilik usaha tidak melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset tetap seperti etalase, kendaraan, dan peralatan kerja. Aset dicatat berdasarkan harga perolehan tanpa mengurangi nilainya sesuai umur manfaat. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 16 tentang Aset Tetap serta PSAK EMKM yang mewajibkan aset diamortisasi secara sistematis untuk mencerminkan penurunan nilai ekonomis akibat penggunaan. Tidak adanya penyusutan menyebabkan beban usaha lebih rendah dari kondisi riil, sehingga laba yang dihasilkan menjadi tidak realistis dan tidak dapat menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi.

**Solusi**

Untuk meningkatkan ketepatan pelaporan aset tetap dan beban penyusutan, usaha dapat menerapkan sistem pencatatan aset tetap yang mencakup identifikasi jenis aset, harga perolehan, umur manfaat, serta nilai residu. Usaha juga dapat mulai menerapkan metode penyusutan yang konsisten setiap periode, misalnya metode garis lurus yang sesuai dengan prinsip akuntansi dalam PSAK 16, sehingga beban penyusutan dapat diakui secara sistematis sepanjang umur manfaat aset.

**Pengakuan Gaji Pemilik**

Pemilik yang aktif mengelola usaha tidak menetapkan gaji untuk dirinya sendiri. Setiap pemakaian dana pribadi dicampur dengan kas usaha, sehingga transaksi pribadi tidak dipisahkan dari transaksi perusahaan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip entitas terpisah dalam PSAK EMKM dan PSAK 1, yang mengharuskan pemilik dan entitas diperlakukan sebagai dua pihak berbeda. Ketidakjelasan ini menyebabkan beban usaha menjadi tidak terukur dan laporan laba rugi tidak mencerminkan kondisi operasional yang sesungguhnya.

**Solusi**

Untuk memastikan pencatatan keuangan yang lebih terstruktur, tim merekomendasikan agar pemilik menetapkan gaji pemilik sebagai beban operasional yang dicatat secara rutin setiap periode, terpisah dari transaksi prive. Penetapan gaji ini diperlukan agar laporan laba rugi dapat menunjukkan biaya operasional yang sebenarnya dan tidak tercampur dengan pengambilan pribadi.

### **Pencatatan Transfer Aset antara Kantor Pusat dan Cabang**

Pemilik tidak mencatat perpindahan barang atau aset dari pusat ke cabang maupun sebaliknya. Tidak adanya bukti mutasi membuat persediaan tidak dapat direkonsiliasi antara pusat dan cabang. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan pencatatan transaksi antar entitas dalam PSAK 4 Laporan Keuangan Tersendiri, serta pengungkapan pihak berelasi pada PSAK 7, di mana pusat dan cabang dianggap sebagai pihak berelasi yang transaksinya harus tercatat dan terdokumentasi. Akibatnya, saldo persediaan, modal, dan aset antar unit menjadi tidak akurat.

### **Solusi**

Untuk memastikan setiap perpindahan barang antara kantor pusat dan cabang tercatat dengan baik, usaha disarankan untuk menerapkan format bukti transfer barang yang digunakan setiap kali terjadi mutasi persediaan antar-unit. Bukti transfer ini harus memuat informasi jumlah, jenis barang, nilai barang, serta pihak yang menyerahkan dan menerima. Selain itu, pemilik perlu melakukan pencatatan mutasi secara rutin dalam buku atau sistem pencatatan sederhana, serta menyusun jurnal hubungan pusat-cabang agar setiap perpindahan barang dapat ditelusuri, diverifikasi, dan disajikan secara benar dalam laporan konsolidasi keuangan.

### **Prive Pemilik**

Pengambilan uang oleh pemilik atau keluarganya dilakukan langsung dari kas usaha tanpa pencatatan. Praktik ini menyebabkan kas usaha sering tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Berdasarkan PSAK EMKM, pengambilan pribadi harus dicatat sebagai pengurang ekuitas dan tidak boleh dicampur dengan beban operasional. Namun, di Toko Bangunan Usaha Baru, seluruh pengambilan terjadi tanpa dokumentasi sehingga ekuitas tidak dapat dihitung dengan benar.

### **Solusi**

Agar modal pemilik dapat dihitung secara akurat, usaha perlu menerapkan pencatatan prive secara terpisah dari beban operasional. Pemilik disarankan menggunakan buku prive khusus untuk mencatat setiap pengambilan pribadi, sehingga tidak tercampur dengan transaksi usaha dan tidak mengaburkan perhitungan modal akhir. Selain itu, pemilik harus melakukan pengelompokan transaksi secara konsisten, yaitu memisahkan mana yang merupakan beban usaha dan mana yang termasuk prive. Dengan pemisahan yang jelas, laporan perubahan modal dapat disusun dengan lebih andal dan mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya.

### **Pencatatan Persediaan**

Tidak terdapat pencatatan persediaan baik untuk barang masuk, barang keluar, maupun stok akhir. Usaha juga tidak pernah melakukan stock opname. Hal ini melanggar prinsip pengukuran dan pengakuan persediaan dalam PSAK 14, yang mengharuskan entitas melakukan pencatatan yang memungkinkan jumlah persediaan dapat diidentifikasi dengan andal. Ketidakmampuan menelusuri persediaan menyebabkan perhitungan HPP tidak akurat dan menghambat penyusunan laporan keuangan.

### **Solusi**

Untuk menjaga keakuratan jumlah persediaan, usaha disarankan untuk melaksanakan stock opname secara berkala, misalnya di akhir bulan atau akhir periode tertentu. Selain itu, pemilik perlu menerapkan kartu stok sebagai alat pencatatan yang berisi informasi barang masuk, barang keluar, serta saldo akhir untuk setiap jenis barang yang dijual. Pemilik juga perlu melakukan pencatatan barang masuk

dan barang keluar setiap hari secara manual atau dengan format sederhana yang sudah disiapkan. Pencatatan rutin ini penting agar jumlah persediaan selalu terkontrol, meminimalkan risiko kehilangan, serta memastikan pergerakan barang dapat ditelusuri dengan jelas dari waktu ke waktu. Kami mengusulkan penerapan metode pencatatan persediaan FIFO (First-In, First-Out) untuk memastikan akurasi nilai persediaan akhir yang disajikan dalam laporan keuangan.

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Bangunan Usaha Baru masih menjalankan kegiatan usahanya tanpa dukungan sistem akuntansi yang teratur. Seluruh transaksi yang terjadi hanya didasarkan pada ingatan pemilik, sehingga tidak tersedia informasi keuangan yang dapat ditelusuri ataupun dijadikan dasar penyusunan laporan. Tidak adanya pencatatan kas, persediaan, penyusutan aset tetap, pencatatan transfer antar-unit, pemisahan prive, dan penetapan gaji pemilik menyebabkan kondisi keuangan usaha tidak menggambarkan secara objektif. Keadaan tersebut melemahkan pengendalian internal dan menghambat proses penilaian kinerja usaha baik di kantor pusat maupun cabang.

Penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem pencatatan sederhana yang dilakukan secara konsisten, seperti penggunaan buku kas, kartu persediaan, daftar aset beserta penyusutannya, serta pemisahan transaksi usaha dan pribadi. Apabila rekomendasi ini dapat diterapkan, maka usaha berpeluang menyusun laporan keuangan sesuai prinsip PSAK EMKM serta memperoleh informasi yang lebih relevan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2008. *Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur Dan Metode*. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi.
- Khaerudin, Taufiq, Aileen Okta Azalia, Nabilah Maulita, and Endang Kartini Panggiarti. 2023. "Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Berdasarkan Penerapan PSAK No. 15, PSAK No. 22 Dan PSAK No. 65." *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* Vol. 10 (2).
- Kurniawan, Mochammad Agung, Norita Citra Yulianti, and Gardina Aulin Nuha. 2024. "Penerapan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK Pada Penggadaian BPRS Bhakti Sumekar Jember." *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* Vol. 9 (2).
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Ramadhan, Abdul Aziz, Arini Nur Arista, Rani Asupa, Ratna Septina, and Carmidah. 2024. "Analisis Perlakuan Akuntansi Hubungan Kantor Pusat Dan Kantor Cabang Pada Usaha Papabendonut Coffee & Eatery." *JURA: Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 2 (1).
- Roefinal, Claudia, Yefni, and Suci Nurulita. 2017. "Analisis Akuntansi Kantor Pusat Dan Kantor Cabang Pada UD. Pasifik Elektrik." *Jurnal Politeknik Caltex Riau* Vol. 10 (2).
- Rudianto. 2009. *Pengantar Akuntansi*. Erlangga.
- Saputri, Sri Wulan, Bunga Puji Lestari, Vania Adisty Hasibuan, and Siti Rodiah. 2023. "Penerapan PSAK 65 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pada PT Dalimo Jaya Motor." *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* Vol. 2 (3). <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i3.2285>.
- Simamora, Henry. 2010. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Salemba Empat.
- Sriyanto, Yianne Gabrila, Pingky Nila Primasari, and Endang Kartini Panggiarti. 2023. "Laporan Konsolidasi Dan Laporan Keuangan Tersendiri Berdasarkan PSAK." *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* Vol. 2 (2).